

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hariadi, Pramono. (2013). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : CV. Andi Offset
- Salim, A. (2006). *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sulistiyani, A. T. (2011). *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suroso, G. (2014). *Azas - Azas Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan*. Jakarta Selatan: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Negara.
- Yani, Ahmad. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta : Grafindo

JURNAL

- Andirani, W. (2007). Perwujudan Good Governance dalam Menghadapi Reformasi untuk Menciptakan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol 2 No. 2* , 47-56.
- Handayani, D. (2012). Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 5* , 12-16.
- Indrawati. (2012). Prinsip Good Financial Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance. *Jurnal Perspektif Vol. XVII No. 3* , 201-211.
- Iqsan. (2016). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1* , 230-240.
- Maghfiroh, N. A. (2016). Efektivitas Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (E-Controlling) Pada Bagian Evauasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang. *Jurnal Paradigma Vol. 5 No. 1* , 34-44.
- Muhamad, P. (2016). Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Badamai Law Journal Vol. 1 No. 2* , 259-280.
- Nopyandri. (2011). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1* , 31 - 48.
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21 No.3* , 409-628.

- Sundari, I. P. (2017). Akuntabilitas Penyampaian Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol. VII No. 1* , 63-70.
- Yahya, I. (2006). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri Vol. 7 No. 4* , 27-29.
- Zulkarnaini. (2014). Implementasi Good Governance Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sensus pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara). *Majalah Ilmiah BISSOTEK Vol. 9 No. 1* , 47-56.

KARYA ILMIAH :

- Hasyim, D. (2014). Good Governance dan Piagam Madinah. *Seminar Nasional dan Call for Papers UNIBA* (pp. 27-43). Surakarta: Universitas Islam Batik.
- Hermawan, A. A. (2015). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung)*. Bandung: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Kusmayadi. (2005). *Upaya Mewujudkan Good Government Governance Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah* . Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Mulyadi, R. (2010). *Tinjauan Atas Penyusunan Anggaran dan Realisasi Kas Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Nurina, E. A. (2014). *Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam Memenuhi Belanja Langsung (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi Periode 2008 - 2012)*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Saputa, D. (2014). *Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Sarofah, R. (2015). *Strategi Pelembagaan Good Governance Dalam PEMILU Legislatif di Jawa Barat Tahun 2014*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Siagian, S. R. (2015). *Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Pelestarian Daerah Aliran Sungai (Studi Pada Masyarakat Sekitar Sungai Bahorok di Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sukarno, K. S. (2009). *Implementasi Good Governance dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 di Kabupaten Karanganyar*. Surakarta: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Syaripudin, R. (2015). *Pengaruh Good Governance dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Bandung)*. Bandung: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

- Tudikromo, A. M. (2015). *Pengaruh Profesionalisme dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dimoderating Dengan Pelaksanaan Sistem Intern Pemerintah*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Wadu, S. (2012). *Penerapan Good Governance dari Segi Transparansi pada Bidang Penyelenggaraan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi Kasus di Timor Tengah Selatan)*. Salatiga: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.

ARTIKEL :

- Astari, E. (2017, Mei 28). *BPK : Opini WTP Bukan Jaminan Tak Ada Korupsi*. Retrieved Oktober 2, 2017, from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-3513210/bpk-opini-wtp-bukan-jaminan-tak-ada-korupsi>

LAIN – LAIN :

- BPK. (2016). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016*. Jakarta : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- ICW. (2016). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2016*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

PERUNDANG – UNDANGAN :

- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.